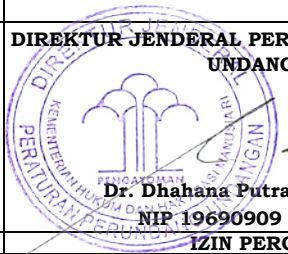










**KEMENTERIAN HUKUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**BAGIAN KEPEGAWAIAN**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>PPE.110.OT.02.02 Tahun 2025</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
<b>TANGGAL REVISI</b>	<b>14 Januari 2025</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>  <b>Dr. Dhahana Putra, Bc.IP,S.H.,M.Si.</b> <b>NIP 19690909 199303 1 001</b>
<b>NAMA SOP :</b>	<b>IZIN PERCERAIAN</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 /SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	1 Memahami peraturan perundang-undangan 2 Memahami prosedur
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
1 SOP Penomoran Surat 2 SOP Peengiriman Surat 3 SOP Hukuman Disiplin	1 Pedoman Penyusunan SOP 2 Jaringan Internet 3 Aplikasi Sumaker 4 Fasilitas Komputer dan Scanner
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi tidak akan berjalan dengan baik	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual - Buku catatan petugas pemrosesan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN PERCERAIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN
		Setjen/Birowai	Dirjen PP	Sesditjen PP	Atasan Langsung Pegawai	Kepala Bagian SDM	Subkoordinator Mutasi dan Pemberhentian	JFU/JFT Pemroses	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
# # #	Mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen PP melalui atasan langsung									Permohonan tertulis PNS dengan disertai alasan yang sah diantaranya : a. Salah satu pihak berbuat Zinah, yang dibuktikan dengan : - Keputusan Pengadilan - Surat Pernyataan dari saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang melihat perzinahan, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib sekurang-kurangnya Camat - Pezinahan diketahui satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan, maka pihak yang mengetahui membuat laporan dan menguraikan masalah perzinahan b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan : - Surat Pernyataan dari dua orang saksi yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat - Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaann yang bersangkutan menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kelurahan dan disahkan oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat d. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari Dokter Pemerintah f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, dibuktikan dengan surat pernyataan dari	Proses Surat Izin Melakukan Perceraian -/+ 1 (satu) bulan	Surat Izin Melakukan Perceraian	
# # #	Memberikan Disposisi Surat Permohonan ijin perceraian untuk ditindaklanjuti												
# # #	Memberikan disposisi kepada Subkoord untuk menyiapkan surat panggilan dan bahan pemeriksaan												
# # #	Membuat konsep surat panggilan pemeriksaan untuk PNS dan istri/suami yang akan melakukan perceraian												
# # #	Koreksi konsep Surat Panggilan Pemeriksaan												
# # #	Menandatangani Konsep Surat Pemanggilan Pemeriksaan												
# # #	Mengirimkan Surat Panggilan kepada Pegawai dan suami/istri yang akan bercerai untuk dilakukan pemeriksaan							